

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan daerah yang optimal dapat dijadikan tolok ukur prestasi suatu daerah dalam menerapkan otonomi daerah. Daerah yang mampu mandiri, aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan pembangunan daerahnya akan mampu mempertahankan kemakmuran daerahnya, tidak hanya target dalam kurun waktu jangka pendek tetapi juga jangka panjang .

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur dirinya sendiri. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri

mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah maka seluruh daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan sesuai dengan kapasitas kemampuan masing – masing daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, terdiri dari :

-) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
-) Dana Peimbangan
-) Lain-lain Pendapatan yang sah

Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini seyogyanya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah

daerah. Menurut Undang – undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat dan Retribusi daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Salah satu pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Dalam Undang – undang No.28 Tahun 2009 pajak daerah terdiri dari Pajak provinsi dan pajak Kabupaten /kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak roko sedangkan Pajak Kabupten / kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak restoran, pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kota Solok merupakan salah satu kota yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Salah satu upaya pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan PAD adalah melalui pemungutan pajak daerah. Pajak sebagai salah satu

sumber PAD yang penting, ditingkatkan potensi dan prospeknya, antara lain dengan melakukan kebijaksanaan yang akan ditempuh, yaitu dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan bangsa.

Jenis-jenis pajak daerah di Kota Solok menurut Peraturan Daerah Kota Solok Nomor : 1 Tahun 2012, terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet. Gambaran struktur pajak daerah di Kota Solok dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :



Tabel 1.1 Struktur Pajak Daerah Kota Solok Tahun 2014

No.	Jenis Pajak Daerah	Penerimaan Tahun 2014 (Rp)	% terhadap pajak daerah
1	Pajak Hotel	365.667.600,00	6,79
2	Pajak Restoran	814.091.026,00	15,12
3	Pajak Hiburan	3.040.000,00	0,06
4	Pajak Reklame	87.806.903,00	1,63
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	2.354.385.986,00	43,73
6	Pajak Miniral bukan logam dan Batuan	-	-
7	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	890.549.600,00	16,54
8	Pajak Parkir	8.288.000,00	0,15
9	Pajak Air Bawah Tanah	-	-
10	Pajak Bumi dan Bangunan P2	859.735.739,00	15,97
	Jumlah Pajak Daerah	5.383.564.854,00	100,00

Sumber: DPPKA Kota Solok (Diolah)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sumbangan terbesar terhadap pajak daerah Kota Solok tahun 2014 berasal dari sektor pajak penerangan jalan. Pada tahun 2014 sektor pajak penerangan jalan memberikan sumbangan terhadap pajak daerah sebesar 2.354.385.986 rupiah. Hal ini terbukti pada tahun 2014 pajak penerangan jalan memberikan kontribusi penerimaan sebesar 43,73% dari total keseluruhan penerimaan pajak daerah Kota Solok. Gambaran target dan realisasi Pajak daerah di Kota Solok selama tahun 2004 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2004 - 2014

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2004	761.389.347	803.691.514	105,56
2	2005	901.930.545	915.951.250	101,55
3	2006	935.052.094	1.004.506.463	107,43
4	2007	1.032.927.668	1.097.808.335	106,28
5	2008	1.124.097.586	1.386.886.056	123,38
6	2009	1.347.924.489	1.339.478.466	99,37
7	2010	1.493.478.326	1.878.901.842	125,81
8	2011	2.332.959.500	2.328.100.239	99,79
9	2012	3.110.500.000	3.911.741.905	125,76
10	2013	3.763.000.000	3.777.923.783	100,40
11	2014	4.895.320.000	5.383.564.854	109,97

Sumber : DPPKA Kota Solok (diolah)

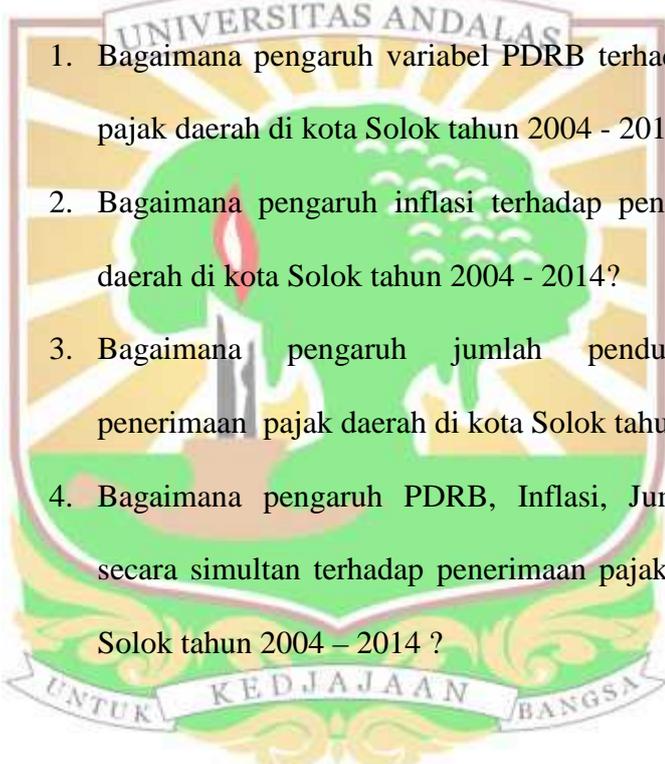
Berdasarkan pada tabel diatas jumlah realisasi pajak daerah terhadap targetnya secara umum mengalami kenaikan, hal ini dapat diketahui dari tahun 2004 - 2014 realisasi pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan kecuali untuk tahun 2009 dan 2011. Peningkatan ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak daerah mempunyai potensi penerimaan yang cukup besar melebihi target yang ditetapkan.

Dengan kontribusi pajak daerah yang semakin besar terhadap PAD, maka pemerintah Kota Solok akan semakin leluasa dalam memanfaatkan dana yang ada, sekaligus akan menambah kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Solok**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 
1. Bagaimana pengaruh variabel PDRB terhadap penerimaan pajak daerah di kota Solok tahun 2004 - 2014?
 2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di kota Solok tahun 2004 - 2014?
 3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di kota Solok tahun 2004 - 2014?
 4. Bagaimana pengaruh PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah di kota Solok tahun 2004 – 2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

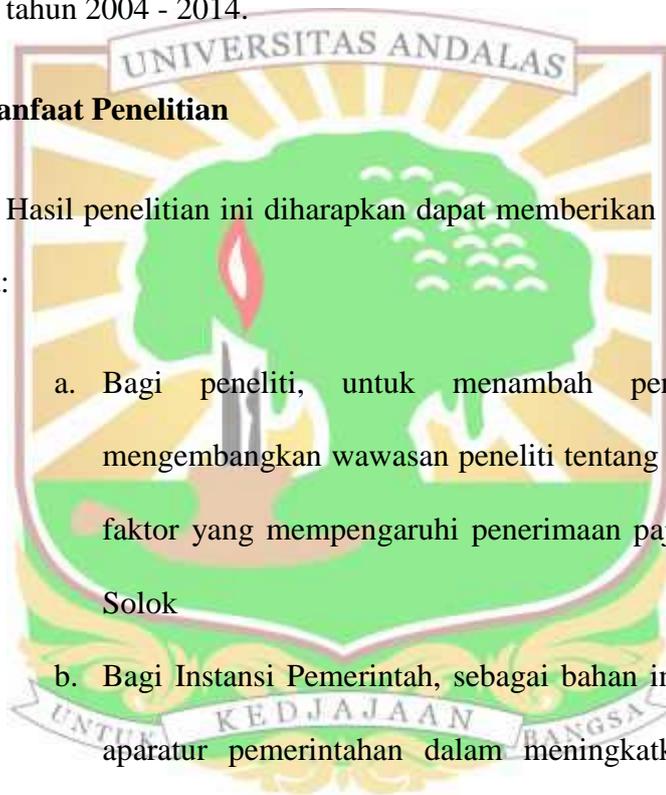
1. Untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB terhadap penerimaan pajak daerah di kota Solok tahun 2004 – 2014

2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di kota Solok tahun 2004 – 2014
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di kota Solok tahun 2004 – 2014
4. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, inflasi, jumlah penduduk secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah di kota Solok tahun 2004 - 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan peneliti tentang analisis faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Solok
- b. Bagi Instansi Pemerintah, sebagai bahan informasi kepada aparatur pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian lebih lanjut.



1.5 Sistematika Penulisan

Uraian dalam penulisan skripsi ini saling berhubungan dari seluruh rangkaian yang secara keseluruhan akan terangkum isinya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa unsur yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

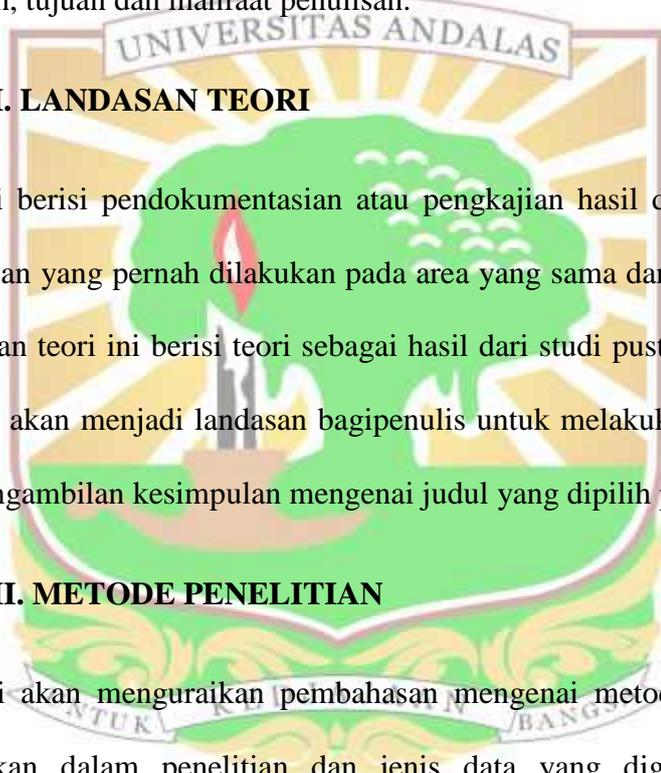
Bab ini berisi pendokumentasian atau pengkajian hasil dari penelitian – penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama dan landasan teori. Landasan teori ini berisi teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang dipilih penulis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai metode analisa yang digunakan dalam penelitian dan jenis data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi semua temuan yang dihasilkan penulis dalam penelitian dan analisa statistik.



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari analisa yang dilakukan dari hasil penelitian.

